



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALIEFMAN HAKIM**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **630781**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.130.000.000**

1. Tanah Seluas 14.500 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 29.505 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.000.000**

1. MOTOR, HONDA AFP 12E21 CO 8 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY PUTIH Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 69.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	4.229.435.950
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	890.185.015
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.523.620.965
III. HUTANG	Rp.	430.429.183
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.093.191.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.